

## **BAB II**

### **DINAMIKA HUBUNGAN SWISS DENGAN UNI EROPA**

Sebagai salah satu negara yang terletak di tengah kawasan Eropa, Swiss yang tidak kunjung menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan UE menimbulkan berbagai asumsi masyarakat terkait alasan Swiss akan hal ini, salah satunya yaitu adanya penyebaran Euroscepticism yang terjadi di Swiss. Meskipun istilah ini jarang digunakan di Swiss, pada kenyataannya sendiri Swiss telah berkontribusi dalam munculnya Euroscepticism, terutama dalam ranah politik maupun ekonomi.

Euroscepticism sendiri telah menguat selama tahun-tahun krisis yang terjadi di Eropa. Skeptisisme yang tersebar di Eropa saat ini menunjukkan ketidakpuasan, kekecewaan, bahkan ketidakpercayaan akan masa depan UE. Dengan semakin sulitnya membendung penyebaran Euroscepticism di wilayah eropa, membuat beberapa negara kembali berpikir ulang akan fungsi dan masa depan UE.

Oleh karena itu, untuk memahami hal tersebut Bab ini secara komprehensif akan mendeskripsikan mengenai peristiwa Euroscepticism di negara anggota UE sebelum membahas Euroscepticism yang terdapat di Swiss. Maka dari itu, dalam bagian selanjutnya akan menjelaskan mengenai gambaran hubungan Swiss dan UE dengan mengklasifikasikan nya ke dalam momentum-momentum penting selama perkembangan UE, terakhir dalam Bab ini akan membahas mengenai bentuk manifestasi skeptis Swiss terhadap integrasi UE.

#### **2.1. Euroscepticism dalam Negara Keanggotaan Uni Eropa**

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, perkembangan Euroscepticism di Eropa mengalami peningkatan yang dinamis. Pada awalnya, pembahasan mengenai Euroscepticism hanya dianggap sebagai penyakit Inggris yang terjadi di Eropa Barat, namun seiring meluasnya UE saat ini, saat ini skeptisisme yang ada justru telah menyebar ke seluruh benua. Hal ini tentunya mengancam integrasi UE itu sendiri. Euroscepticism pertama kali muncul pada majalah '*The Times*' yang

berasal dari Inggris, kata tersebut merujuk pada Anggota Parlemen dalam partai Konservatif yang keberatan mengenai jalur Integrasi Eropa pasca *Single European Act*, dari saat itu perkembangan *euroseptic* mulai meluas di masyarakat Eropa (Leruth, Startin, & Usherwood, 2018).

Dalam bentuk yang paling sederhana, definisi Eurosepticism merujuk pada pertentangan beberapa aspek integrasi Eropa. Konsep mengenai Eurosepticism tidak membahas mengenai mengapa oposisi terjadi, tujuan dari Eurosepticism, serta apa yang harus diterapkan, tetapi konsep Eurosepticism lebih menggambarkan serangkaian praktik yang didorong oleh berbagai macam faktor dan menghasilkan berbagai macam hasil pula. Hasil tersebut saat ini dikenal dengan *hard eurosepticism* dan *soft eurosepticism* yang diperkenalkan oleh Taggart. *Hard Eurosepticism* didefinisikan sebagai prinsip yang menentang integrasi UE dan berusaha untuk menarik diri dari UE. Di sisi lain, *Soft Eurosepticism* masih menunjukkan adanya bentuk dukungan terhadap UE tetapi memperdebatkan salah satu kebijakan ataupun struktur institusi UE (Bijsmans, 2018 ). Munculnya reaksi *hard eurosepticism* dan *soft eurosepticism* dipengaruhi oleh berbagai faktor, meskipun begitu sebagian besar menyatakan bahwa faktor terbesar penyebaran Eurosepticism terjadi karena adanya peranan partai politik dan ekonomi.

Fenomena Eurosepticism ini dapat dibuktikan dengan berbagai macam literatur yang telah membahas mengenai kasus ini, salah satunya yang terjadi di Inggris. Dari beberapa literatur menyampaikan bahwa skeptisisme yang dialami oleh Inggris sebagian besar pada aspek pendekatan ekonomi dan politik. Dalam sisi ekonomi, Inggris merasa lebih banyak kerugian yang di dapat ketika bergabung dengan UE, hal ini tentunya berdampak pada pemikiran masyarakat Inggris. Salah satu kesepakatan yang ada dalam Perjanjian Maastricht adalah pembentukan *European Monetary Union* (EMU) yang diikuti oleh penerapan *single market monetary union*, hal ini ditandai dengan penggunaan mata uang tunggal Euro dan pembentukan *European Central Bank* (ECB). Beberapa literatur mengatakan bahwa, skeptisisme terhadap Euro muncul karena identitas kuat yang melekat pada Poundsterling, dengan adanya sistem mata uang tunggal ini akan mengisolasi

Inggris, dan banyak pula masyarakat Inggris yang meragukan efektivitas dari ECB yang menjalankan fungsi moneter di Eropa (AWANIS, 2015).

Di luar dari aspek ekonomi, peranan partai politik menjadi pengaruh penting dalam penyebaran Euroscepticism di Inggris, karena dengan adanya pengaruh dari partai politik dapat merubah suasana politik domestik di suatu negara termasuk dalam keanggotaan UE. Salah satu partai di Inggris, yaitu *United Kingdom's Independence Party* (UKIP) merupakan partai sayap kanan yang mempermasalahkan kebijakan *Schengen Area* dan *Euro Zone* yang dianggap membuat kedaulatan mereka terancam (Hasibuan, 2016). Dikatakan bahwa selama 20 tahun UKIP sebagai satu-satunya badan politik terorganisir yang menganjurkan penarikan Inggris dari UE, UKIP berhasil memengaruhi 2 partai besar dalam sistem politik Inggris (Donnelly, 2021). Seperti yang diketahui, Inggris saat ini sudah resmi keluar dari keanggotaan UE pada tanggal 31 Januari 2020 dengan adanya periode transisi terlebih dahulu. Dari peristiwa ini, Inggris sendiri mengalami *Hard Euroscepticism* dimana sampai melakukan penarikan diri dari keanggotaan UE, yang disebabkan oleh pengaruh ketidakselarasan Inggris terhadap salah satu kebijakan UE didukung oleh peranan partai politiknya yang kuat.

Negara pendiri UE-pun tidak terlepas dari penyebaran Euroscepticism, salah satunya Perancis. Dalam data yang ditunjukkan di Eurobarometer, telah terjadi peningkatan ketidakpuasan Perancis terhadap UE sejak awal 1990-an. Dalam data Eurobarometer menunjukkan beberapa faktor utama penyebaran Euroscepticism di Perancis terhadap UE disebabkan oleh permasalahan ekonomi, sosial-budaya terkait identitas, hingga isu imigran yang dianggap sebagai ancaman nasional. Dalam pembahasan Euroscepticism di Perancis lebih menekankan pada peranan opini publik (Xhulia Likaj, 2020).

Pada tahun 1970-an ketika survey Eurobarometer diluncurkan, sebagian besar masyarakat Perancis mendukung EEC. Namun, di mulai sejak referendum Perjanjian Maastricht 1992 hanya sebesar 51% masyarakat yang mendukung perjanjian itu. Sejalan dengan itu, data masyarakat yang memandang buruk integrasi UE semakin tahun menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi, dari yang

semula tidak pernah di atas 10% beberapa tahun terakhir dapat mencapai 30%, hal ini diduga karena adanya krisis ekonomi (Xhulia Likaj, 2020)

Pada awal terbentuknya Perjanjian Maastricht, sebesar 44% masyarakat Perancis mengkhawatirkan dengan perjanjian ini akan melemahkan Perancis, ketakutan ini terus berkembang menjadi fenomena nyata. Hingga dalam sebuah data menunjukkan bahwa sebesar 77% percaya bahwa integrasi telah melemahkan ekonomi Perancis. Serupa dengan yang terjadi di Inggris, penyebaran Euroscepticism di Perancis sebagian besar berasal dari pengaruh partai politik di dalamnya (Gronlund, 2016).

Partai politik dapat menentukan sejauh mana Euroscepticism berkembang di suatu negara. Di Perancis terdapat dua macam Euroscepticism di setiap sisi partainya. Partai sayap kiri di Perancis pada awalnya bukanlah Partai yang anti-Eropa, melainkan anti-kapitalisme. Pada tahun 2002 terdapat salah satu partai *Mouvement républicain et citoyen*, Euroscepticism yang terlihat dalam partai ini menunjukkan skeptis dalam aspek ekonomi, partai ini tidak menolak secara terbuka terkait integrasi UE, partai ini menunjukkan ketidaksepakatan terhadap suatu kebijakan sehingga memberikan beberapa alternatif, tetapi tentunya alternatif tersebut ditolak (Gronlund, 2016).

Berbeda dengan sayap kiri, partai sayap kanan melihat masalah Eropa sebagai masalah utama, hal ini karena ideologi partai yang menganut nasionalisme. Tema terpenting yang ditekankan oleh partai sayap kanan di Perancis adalah permasalahan-permasalahan terkait imigrasi, hukum, dan ketertiban. *Rassemblement pour la République*, RPR merupakan partai sayap kanan neo-Gaullist. Gaullist secara tradisional menunjukkan ketidakpercayaan terhadap institusi supranasional. Pada saat Perjanjian Maastricht, banyak kampanye dibawah naungan RPR menolak perjanjian tersebut. Dari masalah-masalah yang disebutkan di atas terlihat bahwa adanya pertentangan kuat yang terjadi di masyarakat Perancis. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Taggart bahwa adanya Euroscepticism adalah segala perjanjian yang berkaitan dengan UE memicu pertentangan di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya *soft* Euroscepticism

di Perancis, dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap beberapa kebijakan UE (Gronlund, 2016 ).

Meskipun begitu, tidak menutup fakta bahwa terdapat beberapa negara keanggotaan UE dengan tingkat Euroscepticism yang terhitung rendah. Negara-negara tersebut adalah Luksemburg sebagai negara pendiri, Irlandia, Portugal, Finlandia, Latvia, Bulgaria, dan Kroasia. Pertama, Luksemburg dikatakan sebagai negara dengan tingkat Euroscepticism paling rendah, karena Luksemburg menganggap adanya ketergantungan negaranya terhadap UE. Meskipun begitu, ada kecenderungan kecil Euroscepticism di Luksemburg terkait aspek ekonomi. Hal ini sama dengan Irlandia, sebagian besar masyarakat melihat secara positif terkait integrasi UE, tetapi ada penyebaran kecil Euroscepticism dalam aspek imigrasi, dimana Irlandia sebagai penerima imigran UE terbesar merasa adanya dampak negatif yang dirasakan, namun kasus terkait migran ini belum mengalami dampak besar yang sampai menimbulkan konflik etnis, sehingga Euroscepticism di Irlandia tidak berkembang pesat. Kemudian, Portugal juga menunjukkan penyebaran Euroscepticism kecil yang terjadi di negaranya, hal ini juga mulai terjadi ketika krisis ekonomi terjadi di tahun 2000an, kepercayaan masyarakat Portugal terhadap UE dan lembaga-lembaga di dalamnya menurun karena mereka menganggap seharusnya UE berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Disini terlihat bahwa ekonomi Portugal dapat dikatakan tertinggal diantara negara-negara anggota UE lainnya, masyarakat-pun menerima kebijakan terkait penghematan yang harus dilakukan negara-negara anggota UE, sehingga hal ini menunjukkan masih ada ketergantungan antara Portugal dan UE (Austers, Besch, Bruge, Bukovskis, & Estrada, 2016).

Finlandia memiliki kasus yang berbeda dari tiga negara di atas yang telah disebutkan, tingkat sikap positif Finlandia terhadap UE termasuk rendah dibanding tiga negara sebelumnya, tetapi juga tidak memiliki kekuatan Eurosceptic yang kuat. Finlandia dapat dilihat sebagai negara Eurorealistik dalam hal keanggotaan UE, keputusan Finlandia untuk bergabung dengan UE berasal dari permasalahan ekonomi dan keamanan yang berkaitan erat dengan perkembangan geopolitik pada

era saat itu. Hal ini dikarenakan ketika Uni Soviet runtuh, Finlandia kehilangan mitra dagang penting dan mengalami resesi ekonomi, maka Finlandia bersedia untuk berintegrasi dengan Eropa sehingga negaranya menikmati stabilitas yang ditawarkan dan disediakan UE. Euroscepticism di Finlandia mulai berkembang pada tahun 2011, ketika Partai Nasional dan Eurosceptic Finns memperoleh 20% dukungan suara publik. Kemenangan partai ini menentang jalannya pro-UE di negara tersebut, tetapi tidak sekuat partai-partai kanan di negara lain, partai ini di stabilisasi-kan oleh suara masyarakat untuk menurunkan sikap Eurosceptic-nya, dikarenakan masyarakat melihat pentingnya integrasi Eropa lebih dari sekadar kepentingan ekonomi (Austers, Besch, Bruge, Bukovskis, & Estrada, 2016).

Di Latvia sendiri respon terhadap integrasi UE cenderung menunjukkan sikap positifnya, tidak ada partai nasional yang mendefinisikan dirinya Eurosceptic. Tidak melupakan permasalahan krisis ekonomi yang dihadapi Eropa, Latvia merasakan dampak yang besar dan dikatakan paling parah, hal ini juga memicu kepercayaan yang rendah pada UE, karena pada data di tahun 2016 hanya sebesar 38,8% yang menunjukkan kepercayaan pada UE. Latvia cenderung menerapkan Eurorealisme, terlepas dari ketidakpercayaan dan ketidaksukaannya terhadap UE, UE masih diterima karena sebagai satu-satunya cara yang dapat mengontrol elit politik dan mempromosikan pembangunan ekonomi di Latvia. Tidak berbeda jauh dengan Latvia, perkembangan Euroscepticism di Bulgaria juga terbilang marginal, karena keanggotaan UE masih dianggap sebagai salah satu pencapaian negara. Terakhir, Kroasia salah satu negara kecil di UE yang dianggap paling Eurorealistik, terutama dalam masyarakatnya. Sebenarnya, tingkat dukungan Kroasia terhadap UE cenderung rendah dimana suara dukungan tetap dalam margin 30%, tetapi alasan mendasar Kroasia tetap bergabung dengan UE adalah stabilitas dan keamanan negara dan kawasan sekitarnya (Austers, Besch, Bruge, Bukovskis, & Estrada, 2016).

Oleh karena itu, dari pembahasan negara-negara kecil keanggotaan UE dapat disimpulkan bahwa penyebaran Euroscepticism cenderung kecil tetapi hal ini dikarenakan kekuatan ekonomi yang rendah menimbulkan ketergantungan pada

UE. Ketergantungan ini bukanlah kekhawatiran bagi beberapa negara besar yang sudah kuat ekonominya.

Dari berbagai contoh kasus yang telah dijelaskan diatas, membuktikan bahwa terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya Euroscepticism di negara anggota UE dengan hasil yang berbeda di tiap negaranya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyebaran Euroscepticism belum dapat terbendung di berbagai wilayah keanggotaan UE. Meskipun begitu, hampir seluruh wilayah Eropa dapat merasakan Euroscepticism, hal ini tidak membendung kemungkinan adanya skeptisisme yang tersebar di negara-negara anggota non-UE, seperti Swiss. Swiss memang bukanlah anggota dari UE, tetapi hubungan Swiss dan UE terjalin cukup baik dari puluhan tahun yang lalu, namun dengan adanya bukti-bukti penyebaran Euroscepticism di keanggotaan UE tidak menutup kemungkinan dapat memengaruhi pemikiran Swiss terhadap keputusannya untuk tidak bergabung pada UE. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan Swiss dan UE secara umum kemudian dilanjutkan dengan pembahasan manifestasi skeptis Swiss terhadap UE.

## **2.2 Hubungan Swiss dan Uni Eropa Secara Umum**

Setelah membahas mengenai penyebaran Euroscepticism yang terjadi di negara-negara keanggotaan UE, telah dikatakan bahwa penyebaran Euroscepticism juga terjadi di negara anggota non-UE salah satunya Swiss. Dengan itu, dalam bagian ini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan antara Swiss dengan UE secara umum dengan pengklasifikasian momentum-momentum penting yang terjadi selama perkembangan UE.

### **2.2.1. Sejarah Swiss Secara Singkat**

Di awali pada tahun 1515, Swiss mulai menerapkan netralitas-nya dengan maksud untuk menghindari konflik serta mempertahankan keutuhan negara. Hal ini dilakukan karena Swiss mengalami kerugian besar yang diakibatkan dari pertempuran Marignano yang terjadi antara Swiss dengan Perancis. Namun, ketika tahun 1798 netralitas Swiss terancam akibat adanya serangan pasukan Perancis

(Napoleon), yang pada akhirnya kedudukan Perancis di Swiss membuat konfederasi kuno Swiss berakhir. Tidak hanya itu, akibat dari dua peristiwa penting ini yaitu Revolusi Perancis dan Invasi Napoleon, membuat Swiss mengalami perubahan negara-bangsa yang baru dengan menjadi negara-bangsa Republik Helvetic pada tahun 1803 dibawah kepemimpinan pemerintahan Napoleon. Pada tahun itu terjadi beberapa peristiwa penting yang dialami Swiss, seperti mulai berlakunya sistem kanton, pertama kalinya Swiss memberikan kedaulatan untuk rakyat, serta hak individu dan persamaan kedudukan di depan hukum. Pada masa itu Perancis menganggap Swiss sebagai negara bawahannya dan dapat dijadikan sebagai *buffer zone* terkait konflik antara Perancis, Austria, dan Rusia (Wachter & Maissen, 2020).

Hingga pada tahun 1815, Napoleon menerima kekalahannya atas Pertempuran Waterloo yang membuat Konfederasi Swiss menjadi memiliki 22 kanton baru karena harus melepaskan Swiss dari pengaruhnya. Di tahun ini pula Swiss telah ditetapkan sebagai negara dengan “kenetralan abadi” yang dideklarasikan di Kongres Wina (Andrews, 2018). Kemudian, kenetralan ini semakin diakui masyarakat internasional tepatnya ketika Perang Dunia I berakhir. Pada awal terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa hingga saat ini, Swiss tetap berpegang teguh pada prinsip ke-netralan-nya, sehingga memengaruhi Swiss dalam mengambil keputusan kebijakan luar negerinya (Andrews, 2018). Pada tahun 1848, terdapat revisi terkait Perjanjian Federal 1815 dikarenakan adanya perselisihan antar kanton yang terjadi sejak tahun 1846 atau yang disebut sebagai *the Sounderbund War* (Damayanti, 2011), ditandai dengan berakhirnya perang *Sounderbund* ini yang kemudian terbentuklah dasar-dasar Konstitusi Federal 1848.

Konstitusi 1848 membahas mengenai aturan tanggung jawab negara federal juga kanton, selain itu konstitusi ini memperkenalkan hak pilih yang hanya diterima oleh laki-laki. Konstitusi 1848 juga mengenalkan prinsip pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif yang dipegang oleh Dewan Federal dan Administrasi Federal, legislatif yang dipegang oleh Majelis Federal, serta yudikatif yang dipegang oleh Pengadilan Federal. Revisi Konstitusi Federal 1848 membawa banyak perubahan positif yang

berpihak pada rakyat, dimana rakyat dapat merasakan kebebasan melakukan perdagangan, ekonomi, beragama, hingga kebebasan dan hak yang sama dalam hukum (Swiss Federal Archives SFA, 2019). Tidak melupakan fakta Swiss yang terkenal akan *direct democracy*-nya, dimulai pada tahun 1874, tatanan Konstitusi Federal Swiss berubah dengan adanya perubahan pada jumlah kanton dan dikenalkan-nya sistem *direct democracy* ini (Lucchi, 2017). Sejak saat itu, kehidupan pemerintahan Swiss mencoba untuk mengejar kestabilan baik dari aspek politik, ekonomi, dan budaya, mengingat masyarakat Swiss yang datang dari berbagai etnis (Damayanti, 2011).

### **2.2.2. Swiss dalam Perkembangan Uni Eropa**

Pembahasan mengenai perkembangan integrasi regional di Eropa mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ide pertama terkait penyatuan negara-negara Eropa dikemukakan oleh Napoleon sejak akhir abad 18, yaitu Eropa dibawah kekaisaran Perancis. Awal mula usaha pembentukan penyatuan Eropa secara damai dipelopori oleh pemimpin *Pan European Movement* yang berasal dari Austria dengan ide "*United States of Europe*" di tahun 1923, namun kuatnya rasa imperialisme dan nasionalisme pada waktu itu membuat segala usaha penyatuan tersebut gagal. Hingga pemikiran penyatuan Eropa dikemukakan kembali pada tahun 1946 oleh Winston Churchill. Mulai saat itu, rencana integrasi Eropa perlahan mulai terlihat, serta mengalami beberapa tahapan hingga terbentuknya Uni Eropa seperti saat ini (Dastanta, 2009) terbagi menjadi 8 perjanjian penting yang akan dibahas secara satu persatu dengan menjabarkan kaitannya dengan kontribusi Swiss di dalamnya (Basis, 2018).

Perjanjian pertama dipelopori oleh pemikiran Robert Schuman yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Perancis, Ia mengusulkan gagasan terkait kontrol bersama atas produksi batu bara dan baja dengan Republik Federal Jerman, terbuka juga untuk negara lain yang ingin bergabung. Usaha penyatuan negara-negara Eropa telah dimulai sejak pembentukan ECSC (*European Coal and Steel Community*) sebagai pendahulu UE yang dibahas dalam Perjanjian Paris, Perjanjian Paris ditandatangani tanggal 18 april 1951 serta berlaku sejak 25 Juli

1952. Perjanjian Paris disetujui dan ditandatangani oleh 6 negara pendiri yaitu, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Luksemburg, dan Perancis. Hasil utama dari Perjanjian Paris ini adalah terbentuknya ECSC, dihapuskannya rivalitas antara Jerman juga Perancis, serta terbentuknya Federasi Eropa (Basis, 2018).

Berkaitan dengan awal pembentukan integrasi, pada kenyataannya Swiss sudah terlebih dahulu berkontribusi pada integrasi Eropa sebelum ECSC didirikan. Pada tahun 1948 Swiss bergabung dengan *Organization of European Economic Community* (OEEC), dimana organisasi ini bertujuan untuk membangun kembali ekonomi dan mempromosikan kerjasama pasca perang Eropa dibantu dengan Marshall Plan. Tetapi, setahun kemudian Marshall Plan mengalami krisis ekonomi yang mana memengaruhi kebijakan bantuan dan tidak cukup untuk diarahkan ke integrasi ekonomi (OECD.org, n.d.). Oleh karena itu, beberapa tahun kemudian Swiss memandang pembentukan ECSC secara pragmatis, tetapi di sisi lain Swiss juga mendukung ECSC karena melihat adanya manfaat dalam hal ekonomi. Pada akhirnya, Swiss memutuskan untuk tidak bergabung dengan ECSC dengan alasan pendirian entitas Eropa ini tidak sejalan dengan prinsip netralitas dan kemerdekaan rakyat Swiss dan memutuskan untuk menyepakati perjanjian kerjasama dengan ECSC (Vahl & Grolimund, INTEGRATION WITHOUT MEMBERSHIP: SWITZERLAND'S BILATERAL AGREEMENTS WITH THE EUROPEAN UNION, 2013).

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya Swiss tidak bergabung dalam keanggotaan ECSC, tetapi Swiss menyepakati perjanjian kontrak dengan ECSC sejak tahun 1950-an, perjanjian ini membahas mengenai penetapan tarif kereta api internasional untuk pengangkutan bahan-bahan besi dan baja yang diangkut dari negara-negara ECSC yang harus melewati wilayah Swiss (Tobler, Hardenbol, & Mellár, 2010 ). Dalam perjanjian nya, negara-negara anggota ECSC harus memberi tahu kepada Dewan Federal Swiss bahwa syarat-syarat yang ditentukan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum domestik Swiss (eur-lex.europa.eu, 1979). Tetapi perjanjian ECSC ditetapkan berakhir pada tanggal 23 Juli 2002, sehingga sejumlah perjanjian dengan negara ketiga termasuk Swiss juga akan

berakhir. Di dalam Pasal 71 Perjanjian ECSC, menyebutkan perjanjian komersial antara ECSC dengan negara ketiga telah disepakati oleh negara anggota. Sehingga, perwakilan dari pemerintah negara anggota bertemu dengan Dewan dan memutuskan bahwa mulai 24 Juli 2002 *European Community* (EC) akan mengambil alih hak dan kewajiban yang telah dibuat oleh ECSC dengan negara ketiga.

Sesaat sebelum keputusan ini ditentukan, perwakilan dari negara anggota dengan Dewan memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian tanggal 28 Juli 1956 tentang penetapan tarif kereta api untuk pengangkutan batu bara dan baja yang melalui wilayah Swiss. Swiss merasa telah kehilangan pondasi perjanjian kerjasama Swiss dengan ECSC. Oleh karena itu, Swiss mengusulkan, melalui Note Verbale dari Perwakilan Swiss kepada EC pada 10 November 2004 dengan persetujuan bersama, untuk mencabut semua perjanjian yang masih berlaku antara ECSC dan Swiss. Perjanjian tersebut antara lain, Perjanjian Konsultasi antara Konfederasi Swiss dan Otoritas Tinggi ECSC tanggal 7 Mei 1956 dan Perjanjian Perdagangan Bebas untuk Produk ECSC pada tanggal 22 Juli 1972. Pencabutan perjanjian Swiss dan ECSC merupakan bagian dari langkah-langkah untuk memastikan bahwa Undang-undang Komunitas jelas dan mutakhir (Council of The European Union, 2009).

Setelah ditetapkannya Perjanjian Paris, pada tahun 1955 enam negara pembentuk ECSC mengusulkan untuk memperluas integrasi Eropa dalam bidang ekonomi. Hasilnya, pada tanggal 25 Maret 1957 Perjanjian Roma telah ditandatangani dan membentuk *European Economic Community* (EEC) dan Euratom. Perjanjian ini membahas lebih dalam mengenai kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, bantuan luar negeri, hingga perpajakan. Di saat yang bersamaan, Perjanjian lain juga ditandatangani yang membentuk Komunitas Eropa dan mendorong kerjasama penggunaan energi atom dibawah organisasi yang bernama Euratom, dari hal ini nantinya menjadi cikal bakal pembentukan *European Community* (Anheier et al., 2012). Sebelumnya, hasil penting dari EEC ini adalah terbentuknya *Custom Union* dimana negara anggota membangun pasar bersama

dengan adanya penghapusan tarif bea, penghapusan hambatan perdagangan, pembatasan kuota impor. Selain itu, dalam EEC juga mulai mengimplementasikan kebijakan nasional anggota dalam *freedom of movement* (Dastanta, 2009).

Dalam perkembangan pembentukan EEC, Swiss menolak untuk bergabung dengan EEC. Oleh karena itu, Swiss bersama dengan 6 negara lain (Austria, Denmark, Norway, Portugal, Swedia, dan Britania Raya) sepakat untuk membangun EFTA (*European Free Trade Agreements*). Jika ditelusuri, EFTA yang dibentuk pada awal tahun 1960 merupakan perkumpulan negara-negara Eropa yang skeptis terhadap usaha integrasi Eropa. Maka dari itu, pembentukan EFTA ditujukan agar negara yang tidak bergabung dengan EEC tetap bisa melakukan kerjasama dengan sesama negara di wilayah Eropa dan sebagai penyeimbang EEC (Jennie, 2019 ).

Pada tahun 1972, Swiss membuat Perjanjian Perdagangan Bebas dengan EEC dibawah naungan EFTA. Perjanjian ini menghasilkan keputusan untuk menghapus bea ekspor-impor dan melarang pembatasan perdagangan berdasarkan volume atau melarang pembatasan produk industri. Kesepakatan itu disetujui oleh masyarakat dari setiap kanton dalam referendum 3 Desember 1972. Sebesar 72,5% dari suara pemilih menyepakati perjanjian ini dan mulai berlaku pada 1 Januari 1973. Tujuan dari Perjanjian antara EEC dengan Konfederasi Swiss adalah sebagai berikut; untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang harmonis antara EEC dengan Konfederasi Swiss melalui perdagangan timbal balik. Memberikan manfaat perluasan perdagangan bagi EEC. Memajukan kegiatan ekonomi, memperbaiki kondisi kehidupan dan pekerjaan, serta peningkatan produktivitas bagi masyarakat Swiss. Untuk memberikan persaingan perdagangan yang adil antara para pihak. Menghilangkan hambatan perdagangan, serta berkontribusi dalam perkembangan serta perluasan perdagangan dunia.

Swiss kembali membuat perjanjian dengan EEC pada tahun 1989. Perjanjian tersebut membahas mengenai pemberian kebebasan pada perusahaan asuransi non-jiwa untuk beroperasi di wilayah satu sama lain. Maka dari itu, perusahaan Swiss yang menyediakan asuransi barang rumah tangga, kendaraan

bermotor, dan asuransi perjalanan dapat mendirikan dan mengakuisisi agen dan kantor cabang di negara anggota EEC, hal ini berlaku juga sebaliknya. Perjanjian tersebut di setuju oleh parlemen di akhir Januari 1992 dan mulai berlaku di Januari 1993 (Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007).

Setelah ditetapkannya Perjanjian Roma dan pembentukan EEC hingga EFTA, muncul kembali Perjanjian baru yang disebut Perjanjian Brussels yang dikenal juga sebagai Perjanjian Merger, perjanjian ini memiliki hasil utama yaitu pembentukan satu Dewan dan Komisi Tunggal Komunitas Eropa, hal ini ditandatangani dengan maksud untuk 3 komunitas Eropa yaitu ECSC, EEC, dan Euratom menjadi satu komunitas yang disebut dengan *European Community/ Masyarakat Eropa (EC/ME)* (EUR-Lex, 2018). Dalam perjanjian Brussels, lebih menekankan pada pembentukan internal integrasi Eropa seperti pembentukan Dewan Menteri yang menggantikan *Special Council of Ministers* pada ketiga komunitas, penerapan '*rotating council presidency*' setiap 6 bulan selama masa jabatan, serta pembentukan badan audit EC (Dastanta, 2009).

Dalam perkembangannya, pada tahun 1971 terdapat perluasan integrasi dimana Denmark, Italia, dan Britania Raya bergabung dalam EC, sehingga negara anggota EC menjadi 9 negara. Di tahun 1981 Yunani menjadi negara ke-10 yang bergabung dalam keanggotaan EC. Melihat hasil-hasil dari Perjanjian Brussels kontribusi atau hubungan Swiss dalam perjanjian ini terhitung sangat minim karena penekanan nya pada aspek internal EC, hanya terdapat beberapa perjanjian antara EC dengan Swiss.

Seperti pada tahun 1990, Swiss dan EC menandatangani Perjanjian Pengangkutan Barang. Perjanjian ini membahas mengenai regulasi izin barang melalui bea cukai dan mengkoordinasi kerjasama di pos wilayah perbatasan. Parlemen menyetujui perjanjian ini pada 13 Maret 1991 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1999, yang pada saat itu sudah dibawah naungan UE (Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007; Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007).

Setelah adanya Perjanjian Brussels, Masyarakat Eropa kembali membentuk perjanjian lain guna mendukung perkembangan integrasi. Perjanjian Schengen ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1985 oleh Belgia, Belanda, Jerman, Luksemburg, dan Perancis. Perjanjian ini membahas mengenai penghapusan perbatasan nasional dengan membangun Eropa tanpa perbatasan yang disebut juga sebagai “*Schengen Area*”. Dilakukan secara bertahap, lima tahun kemudian dalam suatu konvensi, membahas mengenai implementasi dari Perjanjian Schengen, seperti penghapusan kontrol perbatasan internal, visa seragam, kerjasama struktural antara internal dan petugas imigrasi. Dengan konsep ini, *Schengen Area* mengalami perluasan yang tiada henti, dimana Italia bergabung pada tahun 1990, Portugal dan Spanyol bergabung di tahun 1991, dan Yunani di tahun 1992. Implementasi nyata dari Perjanjian Schengen ini mulai benar-benar berjalan pada 26 Maret 1995, dimana 7 negara anggotanya benar-benar menghapuskan kontrol perbatasan internal wilayahnya. Hingga pada 1995 Austria bergabung, kemudian di tahun 1996 Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia juga memutuskan untuk bergabung (Schengen Visa Info, 2020).

Pada tahun-tahun pertama pembentukan Schengen Area, Swiss tidak memiliki kontribusi di dalamnya, pada tahun 2004 Swiss bersama Iceland, Norwegia, dan Lichtenstein memutuskan untuk menjadi bagian dari *Schengen Area* (Schengen Visa Info, 2020). Pada tanggal 5 Juni 2005, 54,6% masyarakat mendukung pengadopsian Perjanjian Schengen. Dalam perjanjian Schengen memutuskan beberapa ketentuan yang harus dilakukan negara anggota Schengen seperti; tidak ada pemeriksaan perbatasan terhadap orang-orang di perbatasan internal negara anggota Schengen, warga yang ingin melintasi perbatasan luar wilayah Schengen harus diperiksa, semua negara anggota Schengen harus menerapkan persyaratan masuk yang sama, semua negara anggota Schengen harus menerapkan kebijakan visa umum untuk masa tinggal jangka pendek (The Federal Council, 2020).

Kerjasama operasional Swiss dengan UE di bawah Perjanjian Schengen dimulai pada 12 Desember 2008 di bidang keamanan, pengakuan visa suaka. Warga

negara ketiga dapat memasuki Swiss apabila menggunakan visa Schengen, Swiss juga dapat mengeluarkan Visa Schengen. Pada saat yang sama, Swiss dapat menyerahkan pencari suaka kepada negara anggota lainnya jika mereka pertama kali memasuki Eropa.

Sampai pada titik dimana Uni Eropa didirikan secara resmi dibawah Perjanjian Maastricht atau yang secara resmi *Treaty on European Union* (TEU) ditandatangani pada 7 Februari 1992 dan mulai berlaku pada 1 November 1993, dengan Perjanjian mengubah Masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa. Dalam perjanjian baru ini terdapat perubahan-perubahan aturan atau kesepakatan yang telah dibentuk oleh perjanjian sebelumnya. Dalam perjanjian ini menghasilkan beberapa poin utama, seperti bahasan mengenai Struktur Serikat, yaitu Perjanjian Maastricht merupakan langkah baru dalam proses menciptakan ‘persatuan yang semakin erat diantara masyarakat Eropa’. Selain itu, juga membahas mengenai struktur kelembagaan tunggal yang terdiri dari Dewan, Komisi, Parlemen Eropa, dan kelembagaan lain yang menjalankan tugasnya sesuai dalam perjanjian. Kemudian, poin mengenai Kekuatan Serikat; Perjanjian Maastricht memberikan kekuasaan tertentu yang diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok pilar. Pilar pertama *European Communities*, diberikannya kerangka kerja dan kekuatan yang dimiliki negara anggota. Pilar kedua membahas mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan bersama yang dapat diatur dalam lingkup UE. Pilar ketiga dibidang peradilan (Sokoiska, 2020).

Sejalan dengan perkembangan tahapan pembentukan UE, UE terus mengalami beberapa perluasan dimana pada tahun 1995 Finlandia, Austria, dan Swedia memutuskan untuk meninggalkan EFTA dan bergabung dengan Uni Eropa. Berbeda dengan Norwegia, penduduknya menolak bergabung dengan UE untuk kedua kalinya (Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007).

Pada tahun 1992, terdapat rancangan kerjasama ekonomi kawasan Eropa, dimana negara anggota UE dan EFTA bekerja sama dibawah naungan *European Economy Area* (EEA) yang tertuang pada referendum tahun 1992. Sehubungan dengan hal ini, Swiss sebagai anggota EFTA memilih untuk tidak bergabung

dengan EEA (FDFA, 2020). Swiss mengadakan pemungutan suara terkait penentuan bergabung atau tidaknya dengan EEA, pemungutan suara ini menghasilkan 50,3% menolak dari jumlah pemilih dibawah 79%. Aturan referendum juga membutuhkan hasil suara dari kanton, hal ini mendapatkan perbedaan suara yang lebih besar dimana 16 kanton memilih tidak dan 7 kanton memilih ya untuk bergabung (Riding, 1992). Keputusan ini menjadikan Swiss sebagai satu-satunya negara anggota EFTA yang tidak meratifikasi perjanjian EEA, namun Swiss memiliki status sebagai *observer* di badan EEA (Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007; Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007). Swiss memutuskan untuk mengambil jalur bilateral dengan UE. Pada tahun 1994 Swiss meluncurkan negosiasi untuk bilateral ini yang meliputi *free movement of persons*, hambatan teknis perdagangan, pengadaan publik, pertanian, transportasi darat, laut, udara, dan penelitian. Implementasi dari negosiasi ini terwujud pada tahun 1997.

Setelah proses panjang diresmikan nya UE di bawah Perjanjian Maastricht, terdapat revisi lebih lanjut dari perjanjian sebelumnya yaitu *Treaty of Amsterdam*, dimana negara-negara anggota menandatangani perjanjian ini pada tanggal 2 Oktober 1997. Dalam perjanjian ini, menghasilkan beberapa poin penting di dalamnya seperti; prioritas utama terkait lapangan kerja bagi warga negara anggota UE karena pengangguran dianggap sebagai masalah utama saat ini, dihapuskan nya hambatan dalam penerapan *freedom of movement*, pembuatan struktur lembaga yang lebih efisien dan penunjukan *High Representative* agar suara UE lebih kuat di dunia internasional, memutuskan visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama, memberikan wewenang kepada Dewan untuk melakukan hukuman pada negara anggota terkait pelanggaran HAM, dan menjalankan kerjasama antar negara anggota minimal 8 negara, walaupun tidak semua negara menyetujui, negara dapat bergabung di kemudian hari.

Di tahun yang sama tepatnya pada tanggal 8 Juni 1997, terdapat inisiatif '*Popular vote on the EU Membership Negotiations*'. Hasil dari pemungutan suara tersebut menghasilkan 74% menolak inisiatif tersebut. Hal ini diluncurkan oleh

*Democrats* Swiss yang bertujuan untuk mencegah Swiss bergabung dengan UE (Skenderovic, 2001).

Sehubungan dengan negosiasi bilateral yang diajukan Swiss kepada UE, pada tanggal 21 Juni 1999 di Luksemburg, Swiss dan UE telah menandatangani tujuh perjanjian di bidang *free movement of persons*, hambatan teknis perdagangan, pengadaan publik, pertanian, transportasi darat dan udara, serta bidang penelitian. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Bilateral I. UE memberikan akses bertahap untuk Swiss ke pasar internal UE, serta memfasilitasi *free movement of persons* dan berpartisipasi dalam program penelitian UE. Dalam referendum pada 21 Mei 2000, masyarakat Swiss menyetujui kesepakatan dari Perjanjian Bilateral I, dengan dukungan suara mencapai 67,2%, hampir semua kanton juga mendukung perjanjian ini kecuali Schwyz dan Ticino. Perjanjian Bilateral I mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002. Diawali dengan periode transisi, Swiss secara bertahap mulai menerapkan *free movement of persons* dimana Swiss dapat mengatur imigrasi dengan cara penentuan kuota. Pada fase kedua, Swiss dapat menerapkan apa yang dikenal sebagai klausul perlindungan dan untuk sementara waktu Swiss dapat membatasi jumlah izin tinggal yang dikeluarkan apabila imigrasi telah mencapai di atas rata-rata (Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007).

Setelah Perjanjian Amsterdam yang telah menyepakati beberapa hal, UE terus memperbarui perjanjian-perjanjian sebelumnya, hingga terbentuknya Perjanjian Nice telah ditandatangani secara resmi oleh negara-negara anggota dan mulai berlaku pada 1 Februari 2003. Perjanjian mengenai akses 10 Negara Anggota baru UE, memasukan amandemen perjanjian pendiri sebagai mana telah diubah dalam Perjanjian Nice, untuk menyesuaikan kerangka kelembagaan dengan kendala perluasan. Poin penting yang dibahas dalam perjanjian ini adalah untuk mereformasi proses pengambilan keputusan di UE terkait permasalahan perluasan di masa depan.

Di saat UE telah mengembangkan berbagai macam dalam sistem internalnya, hingga membuat beberapa negara Eropa lain tertarik untuk bergabung. Swiss masih teguh pada prinsip dengan tidak memilih untuk bergabung. Sejalan dengan

perkembangan UE pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Maret masyarakat Swiss kembali mengadakan inisiatif ‘Ja Zu Europa’ dengan maksud ‘ya untuk Eropa’, para pemilih menolak inisiatif tersebut dengan 76,8% suara menentang, dari hasil tersebut menyerukan segera negosiasi aksesi ke UE. Beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 2004, UE mengalami perluasan dengan bergabungnya 10 negara menjadi keanggotaan UE.

Kemudian, perjanjian baru telah ditandatangani di Lisbon pada tanggal 13 Desember 2007, perjanjian ini sebagai bentuk revisi dari perjanjian sebelumnya. Dengan menghasilkan poin-poin penting seperti menentukan presiden tetap Dewan Eropa serta menciptakan perwakilan tinggi dari *Union for Foreign Affairs and Security Policy*. Selain itu, menetapkan pula bahwa parlemen UE diberi lebih banyak kekuasaan. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Desember 2009. Perjanjian Lisbon merupakan suatu upaya untuk membuat UE lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih efisien. Hal itu menyebabkan penunjukan sejumlah jabatan baru termasuk Presiden Dewan Eropa dan Perwakilan Tinggi Persatuan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan.

Seiring dengan perkembangan UE, pada pembahasan kali ini mengenai Perjanjian Lisbon Swiss tidak memiliki kontribusi yang berarti di dalamnya. Ketika UE kembali mengalami perluasan dengan bergabungnya Bulgaria dan Romania yang menjadikannya memiliki 27 anggota, Swiss masih belum menunjukkan ketertarikannya. Di waktu yang sama, sejak 1 Juni 2007 berkaitan dengan *free movement of persons*, 15 anggota lama UE mendapatkan hak penuh terkait kebijakan *free movement of persons*. Bersamaan dengan itu, Swiss menghapus kuota pada saat berakhirnya masa transisi. Warga negara Swiss dan warga negara anggota UE diperlakukan sama dan diberi izin tinggal jika mereka memiliki kontrak kerja yang sah atau dapat membuktikan kemampuan finansial yang memadai dan memiliki asuransi kesehatan (Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007).

Setelah berbagai Perjanjian yang telah disepakati UE guna mendukung proses integrasi, kerjasama yang dilakukan UE dengan Swiss terus mengalami perkembangan. Seperti pada tahun 2012 Swiss menandatangani kesepakatan

kerjasama dengan *European Defence Agency* (EDA) di bidang persenjataan. Kemudian momentum penting lain yang terjadi antara Swiss dan UE terjadi di tahun 2014, dimana Swiss mengadakan inisiatif ‘Melawan Imigrasi Masal’ yang menghasilkan 50,3% suara mendukung inisiatif tersebut. Oleh karena itu, imigrasi tenaga kerja asing harus dikendalikan melalui pembatasan kuota (Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2007). Di tahun-tahun berikutnya, Swiss masih melakukan beberapa kesepakatan dengan UE seperti Kesepakatan Pertukaran Informasi Otomatis dalam Masalah Pajak di tahun 2015, Kesepakatan untuk menghubungkan sistem perdagangan emisi Swiss dan UE di tahun 2017, dan kesepakatan terakhir terkait partisipasi di bidang kerjasama polisi pada tahun 2019 (The Federal Council of Swiss, 2021).

Dalam bagian ini telah menjabarkan hubungan Swiss dengan UE dengan mengklasifikasikan pada momentum-momentum penting perkembangan UE yang menekankan pada perjanjian-perjanjian UE. Dalam proses hubungan ini, beberapa kali telah disebutkan kesepakatan Swiss terhadap beberapa kebijakan UE yang diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama tanpa menunjukkan keinginan untuk bergabung menjadi anggota UE.

### **2.3. Manifestasi Skeptis Swiss terhadap Uni Eropa**

Jika pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai hubungan dinamis antara Swiss dan UE yang sebatas kerjasama, maka di bagian ini akan memberikan bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa Swiss sebenarnya skeptis terhadap integrasi UE.

#### **2.3.1. Perilaku dan Gerakan Swiss**

Pertama, bermula dari keputusan Swiss untuk tidak bergabung dengan EEC dan memutuskan untuk membentuk EFTA. Bukan tanpa alasan, hanya dengan bergabung dengan EFTA terdapat beberapa manfaat seperti kesepakatan mengenai *free movement of goods* yang sebenarnya tidak berlaku untuk produk pertanian tertentu, tetapi negara-negara EFTA dapat memberlakukan kebijakan tersebut tanpa terkecuali dengan alasan moralitas publik, kebijakan publik, dan keamanan publik.

Serta tindakan tersebut bukanlah tindakan sewenang-wenang atau perdagangan terselubung antar negara-negara EFTA. Berbeda dengan UE, EFTA bukanlah serikat pabean dan tidak memiliki mekanisme pengaturan tarif sendiri, namun EFTA memiliki kebijakan perdagangan yang terkoordinasi dan memutuskan perjanjian perdagangan bebas atas nama anggotanya. Tidak seperti UE, EFTA bukanlah anggota *World Trade Organization* (WTO) tetapi semua negara EFTA adalah anggota WTO, sehingga tiap negara memiliki kursinya sendiri di WTO hal ini memberikan keuntungan bagi negara.

Perilaku Swiss lainnya yang menunjukkan sikap skeptis terhadap UE dapat dilihat dari kesepakatan dalam *Schengen Area*. Hanya dengan menyepakati Perjanjian Schengen, Swiss telah mendapatkan berbagai manfaat terutama dalam pergerakan bebas manusia. Hal ini dipandang lebih menguntungkan Swiss dalam ekonomi juga. Swiss menunjukkan perilaku yang cenderung mengambil keputusan dengan keuntungan maksimal bagi negaranya. Apabila terikat dengan UE maka akan ada banyak hal yang lebih diatur oleh UE. Tak hanya itu, dalam kebijakan *Schengen Area*, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek kedaulatan. Karena mudahnya pergerakan orang dalam kawasan *Schengen* ternyata menimbulkan adanya penyerangan terorisme. Bahkan dalam aspek ekonomi sendiri, kebijakan *Schengen area* memberikan dampak negatif pada aspek ekonomi. Dalam kebijakan Schengen area diberlakukan mengenai kontrol perbatasan yang ternyata membebani negara, salah satu kasusnya yaitu penutupan jembatan yang menghubungkan Denmark dan Swedia yang digantikan dengan kontrol perbatasan sistematis bisa merugikan para pebisnis dan pariwisata Eropa (Schengen Visa Info News, 2020). Tidak hanya perilaku dalam mengambil kebijakannya, Swiss juga menunjukkan perilaku-perilaku pertentangan terhadap UE dengan beberapa gerakan partai politik Swiss, opini publik, hingga peranan media.

Tidak hanya keputusan pemerintah dalam menetapkan kebijakannya yang menunjukkan ketidaktertarikan dengan UE, peranan partai politik juga sangat kuat di Swiss. Salah satunya *Swiss People's Party* (SVP). Delegasi dari partai ini mengajukan inisiatif serta memberikan lampu hijau mengenai referendum terkait

pembatalan kesepakatan Swiss dengan Uni Eropa terkait imigrasi khususnya kebijakan *free movement*. Inisiatif ini memberikan dampak yang belum pasti hasilnya, entah nantinya dari inisiatif ini akan menyerukan pemberhentian perjanjian Swiss terkait *free movement* dengan Uni Eropa atau menyerukan imigrasi menjadi salah satu masalah nasional dengan harapan di masa depan akan mengakhiri segala macam perjanjian dengan Uni Eropa (Local, SVP calls for a vote on ending Swiss-EU freedom of movement, 2017). Anggota Dewan Nasional partai ini, Marco Chiesa mengatakan bahwa daerah asalnya Ticino telah menderita “keadaan darurat di pasar tenaga kerja yang hancur” akibat dari *free movement*. Di daerahnya ketegangan telah meningkat antara penduduk lokal dan pekerja lintas batas, di tahun 2016 partai ini telah memberikan saran atau ‘seruan’ kepada setiap perusahaan untuk lebih mengutamakan penerimaan orang asli Swiss daripada pekerja imigran.

Pemungutan suara terkait inisiatif ini direncanakan oleh *Swiss People’s Party* dan bekerja sama dengan badan anti-imigrasi, *Association for an Independent and Neutral Switzerland* (AUNS) yang bertujuan untuk mengakhiri kebijakan *free movement* antara Swiss dengan UE hal ini juga sebagai lanjutan dari gerakan anti-imigrasi pada tahun 2014, dimana pada tahun 2014 penolakan referendum anti imigrasi yang dipelopori SVP dimenangkan dengan mayoritas suara yang sangat tipis, oleh karena itu SVP kembali percaya diri untuk menyuarakan inisiatif ini (Local, 2017).

Pemungutan suara terkait *freedom of movement* terjadi kembali di tahun 2020, serta *Swiss People’s Party* yang menjadi pionir dari pemungutan suara ini. Sekitar pada bulan September 2020, masyarakat Swiss kembali akan memberikan suaranya terkait proposal yang diperbaharui untuk membatasi jumlah warga negara UE yang diizinkan untuk tinggal dan bekerja di Swiss. Tindakan yang diperjuangkan partai populis ini menginginkan akses preferensial untuk masyarakat Swiss terkait pekerjaan, perlindungan sosial, maupun tunjangan. Tetapi, tindakan ini tidak kunjung mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat maupun pemerintah Swiss (Keaten, 2020). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Swiss People’s*

*Party* merupakan salah satu partai yang begitu menentang kebijakan perjanjian *free movement* antara Swiss dengan UE.

Partai lainnya yang menunjukkan sikap skeptis terhadap UE yaitu *Geneva Citizen Movement* (MCG). Perlu dipahami terlebih dahulu MCG merupakan salah satu partai sayap kanan Swiss, partai ini memiliki keterikatan tersendiri dengan SVP. Diketahui bahwa SVP merupakan salah satu partai sayap kanan yang radikal, sampai pada suatu titik salah satu anggota SVP melihat adanya anggota yang sangat ekstremis serta tidak dapat diatur untuk bisa menjalin kerjasama dengan partai-partai utama lainnya, kedua anggota tersebut yaitu Georges Letellier dan Eric Stauffer. Dikeluarkannya kedua anggota tersebut menghasilkan partai *Geneva Citizen Movement* ini. Partai ini memiliki fokus pada hal-hal yang hampir sama dengan partai SVP yang pada dasarnya menentang penyebaran imigran. *Geneva Citizen Movement* memiliki ambisi untuk menghapuskan komuter lintas batas dan segala menghilangkan tindak kejahatan, kampanye yang dilakukan biasa bersifat agresif. Salah satu slogan yang diterapkan oleh *Geneva Citizen Movement* ialah “*Geneva and Genevans First*” (Bernhard, 2017).

Dibuktikan dengan beberapa pemberitaan mengenai partai ini yang menentang pekerja imigran, mereka mengatakan dengan dipermudahnya kebijakan terkait *free movement of persons*, partai ini menganggap dengan kebijakan tersebut Swiss mengesampingkan pekerja asli dari Swiss sehingga merugikan penduduk asli. Bentuk pertentangan partai ini, diperkuat juga dengan pernyataan salah satu Presiden *Geneva Citizen Movement*, Fransisco Valentin. Dalam salah satu wawancaranya mengenai dukungan terhadap Swiss, Fransisco Valentin mengatakan bahwa “*De ce fait, je m’oppose à tout accord-cadre avec l’UE, sans respect de notre démocratie directe et de notre souveraineté*”, yang memiliki makna “saya menentang perjanjian kerangka kerja apapun dengan UE, tanpa menghormati demokrasi langsung dan kedaulatan kami” hal ini membuktikan ketidak tertarikan terhadap UE (Valentin, 2019).

### 2.3.2. Ja Zu Europa

“*Ja Zu Europa*” yang memiliki arti ‘ya untuk Eropa’ merupakan kampanye yang disebarakan pada tahun 2001, hal ini bermula pada pengajuan *Bundesrat* atau Dewan Federal Swiss untuk bergabung dengan Uni Eropa (Steinberg, 2015). Gerakan “*Ja Zu Europa*” ini dimulai dengan slogan yang berbunyi “*Europa entsteht. Bauen wir mit. Europa entscheidet, entscheiden wir mit*” yang memiliki arti “Eropa sedang berkembang, mari kita bangun bersama, Eropa yang memutuskan, kami bantu memutuskan”. Inisiatif ini dilakukan tidak lain karena merasa bahwa Swiss terikat dengan UE karena perjanjian bilateral, tetapi tidak memiliki hak suara atau pengambilan keputusan terkait dengan undang-undang ini (Swissinfo.ch, 2001).

Kampanye ini dimulai di bulan Januari 2001 dari area stasiun kereta di Swiss, dengan para pendukung aksesi Uni Eropa ini menyebarkan surat kabar pemungutan suara. Di hari yang sama, perwakilan pro-committee juga mengunjungi *Bundestag* (kantor dewan federal) memberikan informasi terkait argumennya, strategi, serta ekspektasi para pro-Uni Eropa. Dengan adanya gerakan ini, tidak memungkiri adanya kebimbangan yang dirasakan pemerintah Swiss, dimana mereka merasa jika harus bergabung dan membentuk masa depan dengan Uni Eropa maka harus dilaksanakan sesegera mungkin karena ditakutkan harga ‘masuk’ yang akan terus meningkat, tetapi di sisi lain mereka juga menganggap hal ini bertentangan dengan sejarah Swiss yang menjadi dasar dari keputusan politik luar negerinya. Dengan itu, sebenarnya para pendukung “*Ja Zu Europa*” ini juga memiliki rasa pesimis terhadap skenario ini karena terlihat kurangnya dukungan masyarakat Swiss sendiri.

Menurut survei oleh Fernsehen DRS serta lembaga riset pasar Lausanne M.I.S-Trend, mengungkapkan bahwa pendukung serta penentang gerakan ini memiliki kekuatan yang seimbang. Oleh karena itu, para pembentuk gerakan ini mengharapkan dukungan penuh dari 6 kanton di Swiss, tetapi tidak ingin kalah, kanton yang menentang gerakan ini juga optimis bahwa gerakan ini tidak akan menang. Kampanye tersebut berlangsung selama 55 hari dan diperkirakan telah

menelan biaya sekitar CHF 1,4 Juta. Berawal dari kampanye nya di stasiun kereta, kegiatan selanjutnya adalah pemasangan poster, iklan, surat kabar di transportasi umum hingga tempat makan selama seminggu, dan menyebarkan di acara-acara besar di Jenewa dan Zurich pada awal Februari dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 maret 2001 (Swissinfo.ch, 2001). Hasil dari gerakan ini ternyata menghasilkan sebanyak 76,8% suara menolak Swiss untuk bergabung dengan Uni Eropa.

**Gambar 2.1.**

**Data Pengambilan Keputusan Inisiatif “Ya Untuk Eropa” yang Dilakukan Masyarakat Swiss Pada Tahun 2001**

Nama Inisiatif	Inisiatif Warga “Ya untuk Eropa”		
Nama Inisiatif (de)	Eidgenossische Volksinitiative 'Ja zu Europa'		
Nama Inisiatif (eng)	Citizen's Initiative "Yes to Europe"		
Negara	Switzerland	Total Pemilih	4,688,585
Tingkatan	Nasional	Tidak Setuju	1,982,549
Institusi	Inisiatif Warga	Setuju	597,217
Hasil	Mengikat	Suara Kosong	24,106
Status	Resmi	Suara Tidak Sah	12,247
Waktu Pelaksanaan	4 Maret 2001	Total Suara	2,616,119
		Suara Sah	2,579,766
		Suara Tidak Resmi	36,353
		Hasil	<b>Tidak Setuju</b>

Sumber: <https://c2d.ch/referendum/CH/5bbbfcae492a21351232e3ed3>

Seperti yang diketahui, dengan sistem *direct democracy* yang dijalankan Swiss gerakan ini juga melibatkan masyarakat secara langsung untuk memilih bergabung dengan Uni Eropa atau tidak. Data diatas menunjukkan bahwa gerakan “*Ja Zu Europa*” atau “Yes to Europe” merupakan gerakan nasional dengan tujuan untuk menentukan apakah Swiss sebaiknya bergabung dengan Uni Eropa atau tidak

yang dilaksanakan pada tanggal 4 maret 2001. Diikuti dengan total 4,688,585 pemilih, menunjukkan hasil pemilih yang tidak mendukung gerakan ini adalah sebanyak 1,982,549 suara, sedangkan masyarakat yang mendukung untuk bergabung dengan Uni Eropa hanya sebanyak 597,217 suara. Dengan adanya 24,106 suara abstain dan suara yang tidak valid sebanyak 12,247, maka dari itu hanya ada 2,579,766 suara yang valid dalam pemilihan ini, dan menghasilkan keputusan bahwa Swiss tidak bergabung dengan Uni Eropa.

### Gambar 2.2.

#### Data Pengambilan Keputusan Inisiatif “Ya Untuk Eropa” yang Dilakukan oleh Pemerintah

Nama Inisiatif	Inisiatif Warga “Ya untuk Eropa”		
Nama Inisiatif (de)	Eidgenossische Volksinitiative 'Ja zu Europa'		
Nama Inisiatif (eng)	Citizen's Initiative "Yes to Europe"		
Kanton Setuju	N/A	Dewan Negara Setuju	6
Kanton Tidak Setuju	23	Dewan Negara Tidak Setuju	33
Dewan Nasional Setuju	69	Dewan Negara Abstain	N/A
Dewan Nasional Tidak Setuju	94	Rekomendasi	<b>Penolakan</b>
Dewan Nasional Abstain	10		

Sumber: <https://c2d.ch/referendum/CH/5bbbfae492a21351232e3ed3>

Seperti yang diketahui, Swiss memiliki pembagian kanton dengan perwakilan tiap kanton disebut sebagai Dewan Nasional (*National Council*), dalam pemilihan *Ja Zu Europa* di ranah pemerintah memiliki hasil Dewan Nasional yang mendukung 64 suara, sedangkan yang menolak sebanyak 94 suara, dan yang abstain sebanyak 10 suara. Dalam pemerintahan ini juga merekomendasikan untuk menolak bergabung nya Swiss dengan Uni Eropa. Dari kedua pengambilan suara masyarakat maupun pemerintah menghasilkan keputusan pemilihan “*Ja Zu*

*Europa*” telah ditolak dengan sebanyak 56% suara menghasilkan keputusan “no” untuk gerakan “*Ja Zu Europa*”.

Pendapat Dewan Federal pada masalah ini mengungkapkan bahwa penolakan ini terjadi karena dianggap inisiatif ini nantinya akan bertentangan dengan distribusi kekuasaan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh konstitusi, artinya apabila bergabung dengan UE maka akan ada peralihan kekuasaan antara Swiss dan UE, hal ini tentunya bukan hal yang biasa dihadapi oleh Swiss. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa negosiasi ini terlalu ditekan oleh waktu, dimana seharusnya negosiasi seperti ini tidak boleh dalam tekanan waktu (The Federal Council, 2019).

### **2.2.3. Pengaruh Media dan Opini Publik di Swiss**

Pada beberapa penelitian yang membahas mengenai Euroscepticism, mengemukakan bahwa salah satu penyebaran Euroscepticism semakin meluas terdapat campur tangan peranan media. Bahkan munculnya istilah Euroscepticism-pun pertama kali dikeluarkan oleh media massa ‘The Times’. Pada subbab kali ini, penulis akan mengumpulkan data terkait tiga media massa terbesar yang ada di Swiss dan sejauh mana media massa tersebut memberitakan mengenai skeptisisme pada UE. Sebagian besar data menunjukkan bahwa media massa atau surat kabar terbesar di Swiss yakni ‘20 Minuten’, fokus dari media tersebut ditujukan kepada pembaca muda perkotaan. Kemudian media massa terbesar kedua dipegang oleh ‘Blick’, di urutan ketiga terdapat surat kabar ‘*Tages Anzeiger*’ sebagai surat kabar pertama yang dianggap independen secara politik dan ekonomi. Berikutnya, posisi ke-empat dipegang oleh surat kabar ‘*Neue Zuercher Zeitung*’ atau yang biasa disebut NZZ. Di urutan kelima terdapat surat kabar yang didirikan oleh mantan pemimpin redaksi *20 minuten*, yaitu ‘*Watson.ch*’. (Media Press Newspaper, n.d.). Swissinfo.ch berada di urutan ke-9, tetapi Swissinfo.ch sebagai media yang memberikan fasilitas 10 bahasa dalam setiap artikelnya. Untuk mengumpulkan data terkait Euroscepticism di Swiss, penulis akan mengambil data dari 3 surat kabar yaitu NZZ.ch, Watson.ch, dan Swissinfo.ch, ketiga surat kabar tersebut memberikan akses gratis untuk pembaca secara daring.

**Tabel 1. Surat Kabar Swiss dengan Kata Kunci "European Union" Dalam Lingkup Pembahasan Politik Dan Ekonomi Swiss**

No.	Surat kabar	Total artikel dengan pembahasan UE	Penilaian negatif thdp UE dalam artikel	Penilaian positif thdp UE dalam artikel
1	Watson. Ch	8 (65)	7	1
2	Swissinfo. Ch	12 (32)	9	3
3	Nzz. Ch	3 (41)	3	0

Surat kabar Watson.Ch merupakan surat kabar Swiss yang menggunakan bahasa Jerman dalam artikelnya. Dalam data menunjukkan bahwa terdapat 65 artikel dalam kata kunci ‘*European Union*’, dengan 8 bahasan yang berkaitan dengan Swiss, 7 diantaranya memberitakan informasi yang bertentangan dengan UE. Mayoritas artikel membahas mengenai kebijakan UE terkait imigrasi, dalam salah satu artikel mengatakan bahwa dalam konstitusi baru terdapat salah satu pasal yang tidak sesuai dengan kondisi Swiss, hal ini membuat masyarakat Swiss kesal terhadap UE dan menganggap bahwa Swiss adalah negara jajahan UE (Blunschi, 2017). Bahkan dalam pemberitaan terbaru terdapat salah satu kasus terkait penembakan migran di perbatasan yang dapat menyebabkan konflik politik antara UE dan Swiss (Hess, 2020). Dilihat dari pemberitaan ekonomi, terdapat satu artikel yang menunjukkan bahwa Swiss tidak bergabung dengan UE adalah keputusan yang tepat, hal ini berkaitan dengan krisis Rusia dimana UE mendapatkan sanksinya, hal ini tidak memengaruhi Swiss sehingga Swiss tidak mengalami kerugian yang cukup berarti.

Media massa kedua yaitu Swissinfo.ch yang memberikan artikel terkait berita-berita Swiss dengan bahasa utama bahasa Inggris. Dalam media massa Swissinfo.ch terdapat 32 artikel yang muncul dengan kata kunci *European Union*, dan 12 diantaranya membahas mengenai hubungan UE dengan Swiss dalam ranah ekonomi dan politik. Sembilan diantaranya memiliki pembahasan yang negatif terhadap UE. Salah satu artikel terbaru, membahas mengenai regulasi lingkungan,

disebutkan bahwa regulasi lingkungan di Swiss lebih ketat dan tertib daripada UE, bahkan Swiss memiliki regulasi paling ketat terhadap hewan di dunia. Selain itu, pembahasan yang sering muncul dalam artikel di media massa ini adalah permasalahan imigrasi dan keterkaitannya terhadap partai sayap kanan di Swiss.

Ketiga, *Neue Zuercher Zeitung* atau biasa dikenal dengan NZZ, dalam beberapa survei menyebutkan bahwa surat kabar ini sebagai surat kabar terbesar kedua yang paling sering dibaca oleh masyarakat Swiss. Apabila mencari kata kunci *European Union*, terdapat 41 artikel yang muncul tetapi hanya ada 3 artikel yang membahas keterkaitannya dengan politik dan ekonomi Swiss. Tetapi dari ketiga artikel tersebut membahas mengenai sisi negatif UE. Pembahasan pertama terkait ECB, dimana hal ini dapat menyebabkan krisis ekonomi bagi UE pada masa pandemic. Lagi-lagi, isu mengenai imigran, diberitakan bahwa Swiss mengajukan kebijakan baru terkait *free movement* tetapi hal ini ditolak oleh UE.

Dari ketiga media massa tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar membahas mengenai sisi negatif UE. Mayoritas pemberitaan terkait isu imigrasi, keamanan perbatasan, dan adanya keterlibatan partai politik di Swiss yang menentang UE. Bahkan dalam tulisan artikel sering menunjukkan bentuk kekesalan dan kekecewaan masyarakat Swiss pada UE. Pemberitaan sisi positif UE cenderung lebih sedikit dan hal ini biasanya membahas mengenai kesepakatan kerjasama yang disetujui antara UE dan Swiss. Jadi, sejauh ini dari sisi media cenderung menunjukkan kepada masyarakat sisi skeptisnya terhadap UE, padahal seperti yang telah disebutkan di atas pengaruh media terhadap pandangan masyarakat memegang peranan penting.

Media massa tentunya memengaruhi opini publik, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh seorang analis dengan bahan pertanyaan “apakah Anda mendukung Swiss bergabung dengan UE atau mendukung Swiss tetap di luar UE?”. Dari survei tersebut menghasilkan responden pria dengan usia yang terbelah dalam usia produktif melaporkan kurangnya keinginan untuk bergabung dengan UE. Begitu pula dengan pelajar dan lansia yang menentang keanggotaan UE daripada

warga negara yang bekerja paruh waktu. Kemudian, survei berdasarkan wilayah, memperoleh hasil responden yang berbahasa Jerman dan Italia cenderung menentang keanggotaan UE berbeda dengan respon dari masyarakat yang berbahasa Perancis menunjukkan keinginannya untuk menjadi anggota UE (Kuhn, Lancee, & Sarrasin, What Explains Increasing Euroscepticism in Switzerland? A Longitudinal Analysis, 2018).

#### **2.3.4. Kelemahan Ekonomi UE**

Eurozone sebagai sebuah kawasan yang menggunakan satu mata uang tunggal Euro di satu sisi mendatangkan keuntungan serta menambahkan *bargaining position* di wilayah Eropa. Tetapi di sisi lain, penerapan *eurozone* di negara-negara yang tergabung menimbulkan banyak permasalahan, hal ini dikarenakan kurangnya tingkat adaptasi antar negara *eurozone* dan juga karena tidak semua negara menyetujui sistem moneter dalam perekonomian di wilayah *eurozone*. Seperti yang diketahui UE pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat terpuruk, diawali dari krisis ekonomi yang dialami Yunani sebagai salah satu negara yang tergabung dalam *eurozone*, hal ini membawa ketakutan akan adanya efek domino yang memengaruhi negara-negara lain yang tergabung dalam *eurozone*. Banyak yang menganggap apabila Yunani tidak bergabung dengan *eurozone*, bisa jadi hutang yang dimiliki Yunani tidak akan sebesar ketika Yunani bergabung dengan *eurozone*, serta tidak sampai mengalami krisis ekonomi seburuk ini hingga memengaruhi wilayah Eropa.

Tak hanya itu, dalam implementasi penggunaan mata uang tunggal euro, setiap warga negara dipaksa untuk menerima dan menggunakan mata uang yang diberlakukan oleh otoritas Eropa, hal ini ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip UE yang menjaga kebebasan individu dan keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Selain itu, dengan mata uang tunggal, pasar uang UE bergantung pada perusahaan monopoli, dimana dalam kasus ini perusahaan supranasional dipegang oleh Bank Sentral Eropa (ECB), negatifnya ECB memiliki kekuasaan untuk pemusatan paksa produksi uang (Mursa). Oleh

karenanya, *eurozone* dianggap memiliki banyak sekali hal-hal yang merugikan bagi negara anggota, hal ini dapat memengaruhi pemikiran Swiss untuk tidak bergabung dengan UE yang mana nantinya ditakutkan secara tidak langsung akan mengubah sistem mata uang Swiss menjadi *euro*.

Swiss yang merupakan salah satu negara terkaya di benua Eropa, walaupun berbagai krisis ekonomi telah melanda di negara-negara tetangganya tidak menghalangi PDB Swiss yang terus tumbuh setiap tahun. Frank Swiss sebagai salah satu mata uang terkuat di dunia, memiliki nilai yang terus meningkat secara substansial terhadap dolar AS dan Euro, dengan adanya Krisis Eropa banyak investor mencari *safe heaven* di Frank Swiss (Talking Of Money , 2021) Oleh karena itu, dengan kekuatan ekonomi yang telah dimiliki oleh Swiss akan menjadi sebuah kerugian apabila Swiss harus bergabung dengan *eurozone*.

Kekuatan ekonomi Swiss sebagian besar disebabkan oleh jangkauan dan jalinan yang kuat dengan ekonomi negara lain. Swiss memiliki salah satu tingkat ekspor tertinggi, perusahaan kecil hingga menengah sangat terspesialisasi dan fleksibel menjadikan Swiss memiliki ciri sektor industri yang berteknologi maju (Tsvirko, 2019). Tak hanya itu, kekuatan ekonomi Swiss juga dapat dilihat dari berbagai faktor seperti tingkat pengangguran yang rendah di Swiss yang hanya mencapai 3,2% pada Agustus 2016. Dalam konteks kemakmuran ini, masyarakat Swiss takut akan kehilangan hal tersebut apabila Swiss bergabung dengan UE. Melihat dari berbagai kerugian dan kelemahan yang didapatkan dari mata uang tunggal membuat Swiss semakin skeptis terhadap UE, terutama apabila dibandingkan dengan mata uang nasional Swiss yaitu Frank Swiss, tentunya sudah sangat menguntungkan bagi negara Swiss untuk mempertahankan mata uang tersebut tanpa harus mengubah mata uangnya menjadi *euro*

### **2.3.5. Integrasi tanpa Keanggotaan**

Diluar konteks eurozone, Swiss dan UE menjalin kerjasama dengan menandatangani dua perjanjian bilateral pada tahun 1994 dan 2004, Perjanjian Bilateral I mulai berlaku pada tahun 2002 dan Perjanjian Bilateral II yang mulai berlaku pada 2004, dengan kedua perjanjian ini Swiss terintegrasi lebih erat dengan UE. Swiss dan UE sebelumnya hanya bekerjasama sebatas urusan ekonomi, tetapi hubungan keduanya semakin diperkuat dengan adanya kerjasama diberbagai bidang lainnya seperti pendidikan hingga peradilan. Swiss melihat adanya manfaat yang dapat dirasakan dengan sektoral bilateral ini, Swiss menganggap dengan Perjanjian Bilateral ini adalah model yang lebih 'statis' apabila dibandingkan dengan menjadi anggota UE yang di anggap lebih 'dinamis'. Dengan perjanjian bilateral tersebut dapat memberikan otonomi yang lebih besar pada otoritas Swiss untuk menentukan ruang lingkup dan sejauh mana kerjasama yang diinginkan oleh Swiss dengan UE, tak hanya itu, dengan perjanjian ini sudah memberikan berbagai manfaat yang setara dengan menjadi keanggotaan UE, hal ini akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembahasan kali ini.

Perjanjian Bilateral I yang dinegosiasikan antara tahun 1994 sampai 1998 terdiri dari tujuh perjanjian yaitu penelitian, hambatan teknis untuk perdagangan, pergerakan bebas bagi orang, transportasi udara, transportasi darat, pertanian, pengadaan publik. Dalam kerjasama dibidang penelitian menjadikan Swiss sebagai salah satu negara yang terlibat dalam Program Kerangka Kerja Penelitian UE ke-5, dengan status ini memberikan manfaat bagi lembaga penelitian Swiss untuk memiliki hak yang sama dalam semua program dan aktivitas program kerja yang sedang berjalan. Lebih khusus lagi, peneliti di negara asosiasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peneliti dari negara anggota UE, termasuk hak untuk berperan sebagai koordinator proyek dan menerima pendanaan dari Komisi sesuai dengan aturan UE. Pada perjanjian mengenai hambatan teknis untuk perdagangan, perjanjian ini memberikan timbal balik atas penilaian kesesuaian standar (sertifikasi, pengujian, otorisasi produk, dll), perjanjian tersebut mengakui kesetaraan undang – undang Swiss dengan undang – undang UE yang

menyederhanakan prosedur dan mengurangi biaya bagi produsen di kedua pasar. Selanjutnya, *free movement of persons* dipandang sebagai kesepakatan terpenting dalam Perjanjian Bilateral I, perjanjian tersebut menetapkan warga negara Swiss dan UE berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang sama di Swiss dan UE. Perjanjian mengenai transportasi udara, menetapkan Swiss untuk disertakan dalam penerbangan sipil UE. Begitu juga dengan perjanjian mengenai transportasi darat menetapkan pembukaan pasar timbal balik untuk pengangkutan barang melalui jalur darat dan kereta api, dalam perjanjian ini kedua belah pihak juga berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur perkeretaapian. Perjanjian selanjutnya mengenai pertanian, dalam perjanjian ini meliberalisasi perdagangan dalam kategori produk pertanian tertentu dengan menurunkan tarif dan mengurangi atau menghilangkan sejumlah hambatan non-tarif. Perjanjian terakhir yang ditetapkan dalam Bilateral I yaitu perjanjian UE-Swiss tentang pengadaan publik yang didasarkan pada perjanjian WTO mengenai pasar pengadaan publik. Perjanjian pengadaan publik antara Swiss dan UE juga memperluas cakupan kerjasama ke seluruh sektor energi selain listrik (FDFA, 2014).

Perjanjian Bilateral II dinegosiasikan antara tahun 2001 dan 2004 yang terdiri dari 9 perjanjian dan 1 deklarasi. Perjanjian tersebut membahas mengenai barang pertanian olahan, statistik, media, lingkungan, pensiun, pendidikan hingga pelatihan kerja, perpajakan tabungan, kerjasama *Schengen*, kerjasama Dublin, dan deklarasi melawan penipuan. Tiap perjanjian tersebut akan dijelaskan lebih dalam mengenai manfaat yang didapatkan dari perjanjian ini tanpa adanya keanggotaan Swiss dalam UE.

Perjanjian terkait barang pertanian olahan, membahas mengenai skema kompensasi harga yang ditetapkan antara kedua belah pihak dan sebagai perjanjian lanjutan yang dulunya sudah pernah dibahas pada tahun 1972. Selanjutnya, perjanjian mengenai statistik memungkinkan bagi Swiss untuk dapat mengakses data pan Eropa dan menjamin kompatibilitas data, selain itu program tahunan bersama untuk Swiss dan Komisi Eropa juga sedang dikembangkan dalam kerangka kerja multi statistik tahun UE. Kemudian, perjanjian mengenai pensiun

membahas mengenai menghindari pajak berganda dari pensiun mantan pejabat UE yang tinggal di Swiss, asalkan penghasilan tersebut dikenakan pajak pada sumbernya (yaitu di UE). Selanjutnya kesepakatan mengenai perpajakan tabungan adalah kewajiban Swiss memperkenalkan pajak retensi atas pendapatan dari tabungan, dimana pada akhirnya ditetapkan sebesar 35% akan dibayarkan kembali ke negara anggota UE. Kemudian, Perjanjian Schengen mengarah pada penghapusan kontrol orang-orang di perbatasan antara UE dan Swiss. Selanjutnya, Perjanjian Dublin mengizinkan Swiss untuk berpartisipasi dalam kerjasama suka dengan UE. Terakhir, deklarasi melawan penipuan merupakan kesepakatan antara Swiss dan UE yang memperkuat kerjasama keduanya melawan penipuan. Perjanjian tersebut memperkenalkan komitmen untuk memberikan administrasi dan bantuan hukum untuk pajak tidak langsung, subsidi dan pengadaan publik, serta mempercepat kerjasama antara otoritas bea cukai, pajak dan kehakiman (FDFA, 2014).

Dampak dari Perjanjian Bilateral ini telah menyebabkan perubahan penting dalam sistem politik dan ekonomi di Swiss. Konsekuensi pertama yang dihadapi Swiss adalah mengubah kekuasaan diantara para aktor utama dalam sistem politik Swiss yang rumit, dimana kekuasaan eksekutif pemerintah telah diperkuat dan kekuatan rakyat Swiss dalam demokrasi langsung tetap utuh, yang mana setiap aspirasi masyarakat yang disetujui oleh semua pihak akan menjadi referendum yang nantinya berpengaruh pada hampir seluruh rangkaian kesepakatan antara UE dan Swiss. Kedua belah pihak saat ini menyetujui hubungan yang seperti ini dan untuk saat ini keduanya fokus pada pelaksanaan implementasi tiap perjanjian secara penuh (Vahl & Grolimund, *Integration Without Membership: Switzerland's Bilateral Agreements with The EU*, 2006)

Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh pihak Swiss untuk menilai biaya dan manfaat yang didapatkan dari Perjanjian Bilateral I dapat meningkatkan ukuran ekonomi Swiss hingga 2% dalam jangka panjang atau sekitar € 5 miliar. Diperkirakan juga bahwa dengan kesepakatan terkait hambatan teknis untuk perjanjian perdagangan mewakili sekitar 0,5-1% dari total nilai produk. Pada

Perjanjian Bilateral II, kesepakatan mengenai barang-barang pertanian olahan meningkatkan volume perdagangan senilai hampir €1 miliar per tahun. Oleh karena itu, dari berbagai manfaat yang didapatkan hanya dari kerjasama yang telah disepakati membuat Swiss leluasa untuk menentukan sejauh mana hubungan Swiss dengan UE tanpa harus menjadi negara anggota di UE (Vahl & Grolimund, *Integration Without Membership: Switzerland's Bilateral Agreements with The EU*, 2006)